

BAB III

KESULITAN YANG DIHADAPI MUSLIM AUSTRALIA

Bab ini akan membahas mengenai kesulitan-kesulitan yang dihadapi umat Muslim di Australia diawali dengan penjelasan kesulitan yang dialami Muslim di Australia terkait dengan status mereka sebagai minoritas Muslim di negara Australia. Dilanjutkan dengan penjelasan hubungan antara Muslim dan non-Muslim di Australia, bagaimana non-Muslim di Australia memperlakukan Muslim sebagai minoritas.

A. Muslim Sebagai Minoritas di Australia

Kekuatan identitas politik dan arus globalisasi memicu munculnya kembali permasalahan minoritas. Hal itu berkaitan dengan terkikisnya batas negara dan bangsa serta bangkitnya kesadaran kelompok minoritas atas respon globalisasi tersebut. (Ahmad Suaedy, 2012, hal. 1)

Kelompok minoritas menjadi sebuah entitas sosial yang tidak dapat dinafikan keberadaannya. Hampir di setiap negara kehadiran kaum minoritas menjadi sebuah keniscayaan yang tidak dapat terbantahkan di tengah hegemoni kelompok kaum mayoritas. Keminoritasan dapat terjadi apabila adanya keberadaan dari mayoritas atas dasar identitas, baik agama, bahasa, etnis, budaya atau pilihan orientasi seksual. Dilihat dari segi jumlah biasanya tidak banyak apabila dibandingkan dengan penduduk di suatu negara. Oleh karena itu, ia berada pada posisi yang tidak dominan. (Fadhli, 2014)

Dari segi bahasa, minoritas biasanya didefinisikan sebagai golongan sosial yang jumlah masyarakatnya jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan golongan lain dalam suatu masyarakat, dan karena merupakan bagian kecil itu sering kali didiskriminasi oleh golongan lain. (Ahmad Suaedy, 2012, hal. 7)

Minoritas Muslim adalah bagian penduduk yang berbeda dari penduduk lainnya karena anggota-anggotanya mengakui bahwa Muhammad adalah utusan Allah yang terakhir dan

meyakini ajarannya adalah sebuah kebenaran, sedangkan disisi lain penduduk lain tidak mengakui hal yang serupa dengan hal itu. Dan minoritas disini adalah yang seringkali mendapatkan perlakuan yang berbeda dari orang-orang yang tidak mempunyai keyakinan seperti itu. (Mubasirun, 2015)

M. Ali Kattini menjelaskan bahwa ada 3 bentuk munculnya minoritas Muslim. *Pertama*, dalam segi jumlah anggota Muslim di suatu wilayah tergolong mayoritas. Kemudian seiring berjalannya waktu Muslim dijadikan sebagai subjek yang tidak efektif oleh kelompok non-Muslim sehingga terjadinya pengaruh penduduk oleh komunitas non-Muslim. Saat itu juga terjadinya pengusiran besar-besaran oleh kaum non-Muslim, sehingga menjadikan kebalikan bahwa keberadaan Muslim menjadi minoritas.

Kedua, ketika suatu negara dipimpin oleh seorang Muslim dalam kurun waktu tidak lama, dan kepemimpinannya dalam menyebarkan Islam dianggap kurang efektif bahkan tidak mencapai tujuan yaitu menjadikan Muslim mayoritas di suatu wilayah tertentu, pada saat yang bersamaan kekuatan politiknya menurun, awalnya kepemimpinannya bertujuan untuk menjadikan Muslim yang minoritas menjadi mayoritas, dalam hal ini justru keterbaliknya. Kasus ini seperti yang terjadi di India dan Balkan.

Ketiga, minoritas Muslim terjadi ketika non-Muslim dilingkungan non-Muslim pindah menjadi Muslim. Adanya sebuah perkumpulan antara sesama pemeluk Islam yang baru, dapat dikatakan bahwa minoritas bertemu dengan minoritas. Biasanya hal ini dipengaruhi salah satunya oleh arus imigran. Seperti yang terjadi di Australia, dilihat dari sejarah yang ada bahwa Muslim datang dari beberapa negara seperti Afghanistan, Lebanon, Turki, Arab, dan kawasan Timur Tengah lainnya. (Mubasirun, 2015)

Setiap negara di dunia memiliki minoritas agama. Negara-negara di Asia seperti Filipina dan Thailand, memiliki minoritas Muslim di Patani, Thailand Selatan, Mindano Filipina Selatan, dan Myanmar. Indonesia memiliki kelompok minoritas seperti Protestan, katolik, Hindu, Budha, Konghucu, dan kelompok kepercayaan. Istilah minoritas agama dalam

pendekatan Hak Asasi Manusia (HAM) berarti juga minoritas keyakinan seperti kelompok kepercayaan dan agama lokal (Ahmad Suaedy, 2012, hal. 12). Begitu juga di Australia, Muslim adalah agama yang minoritas disana.

Australia memiliki sejarah peradaban umat Muslim yang panjang dan sangat bervariasi, diperkirakan masuknya Islam sudah hadir sebelum pemukiman Eropa. Beberapa pengunjung awal Australia adalah Muslim dari Indonesia Timur. Mereka membangun hubungan dengan daratan Australia sejak abad ke 16 dan 17. Kini pertumbuhan Muslim di Australia semakin pesat dan berkembang, namun tidak dapat dipungkiri seiring dengan perkembangannya terdapat juga tantangan yang harus diselesaikan. (Natashi, 2016)

Terdapat sekitar 476.290 Muslim yang ada di Australia saat ini. Mereka berasal dari 70 negara yang berbeda bahasa dan kebudayaan. (Wilda Fizriyani, 2017) Jumlah Muslim di Australia meningkat pada kurun waktu 26 tahun terakhir. Menurut hasil sensus 2016, dilansir dari *news.com.au*, jumlah orang Australia yang mengidentifikasi sebagai Muslim tumbuh 160 persen sejak tahun 1991. Jumlah penganut Islam mencapai 2,6 persen dari total populasi penduduk Australia, hal ini terjadi peningkatan dibandingkan pada tahun 2011 dengan presentase 2,2 persen. Presentase 2,6 persen dari jumlah penduduk Australia ini menjadikan Islam sebagai agama yang minoritas jika dibandingkan dengan agama lain, terutama Kristen yang mempunyai jumlah presentase sebesar 51%. (Puspita, Sensus: Penganut Islam di Australia Naik 160 Persen, 2017)

Australia merupakan masyarakat yang egalitarian dimana pemerintah tidak ikut campur urusan agama. Namun disisi lain Australia memiliki kebudayaan yang keras yaitu praktis, pragmatis, rasional, serta bersifat keduniawian. Mungkin juga merupakan salah satu negara yang paling sekuler di dunia. Pada dasarnya hampir semua universitas-universitas di Australia didirikan sebagai lembaga-lembaga non-agama dan studi-studi teologi tidak diadakan sama sekali, sedangkan pada umumnya afiliasi dalam sebuah agama dilarang. (Richard H. Chauvel, 1992)

Pemerintah Australia yang lebih didominasi oleh kaum non-Muslim dianggap mampu memberikan kebebasan agama dengan baik bagi masyarakatnya. Meskipun Australia dikenal dengan negara yang menganut sistem sekularisme, negeri ini dinilai dapat memberikan perlindungan minoritas seperti Muslim.

Pemerintah Australia memahami Muslim dengan sangat fleksibel. Ajaran Islam dibagi menjadi tiga bagian, yaitu disebut sebagai nilai inti, lapis kedua sebagai interpretasi, dan lapis ketiga sebagai manifestasi budaya. Wilayah yang masuk dalam nilai inti atau tanpa interpretasi (yang berhubungan dengan syariah, seperti keimanan) contohnya setiap Muslim wajib menjalankan kewajibannya sebagai seorang Muslim yaitu melaksanakan shalat lima waktu. Semua orang setuju akan pendapat ini dan tidak adanya pertentangan. Adapun yang masuk dalam wilayah kedua adalah interpretasi, yaitu bagaimana cara melaksanakan shalat. Sebagian orang sepakat dengan cara tertentu, sedangkan sebagian lainnya belum tentu setuju dengan cara tersebut. Yang masuk dalam wilayah ketiga adalah manifestasi dari nilai inti, hal ini sangat dipengaruhi oleh kondisi sosiogeografi, misalnya model pakaian yang dipakai untuk shalat. Muslim Australia sepakat bulat pada ajaran lapis pertama, dan bisa jadi menjadi sangat berbeda jauh pada ajaran lapis ketiga. (Munjin, 2009)

Perlakuan mayoritas terhadap minoritas yang dialami oleh Muslim di Australia berbeda dengan yang dialami minoritas Muslim di Inggris. Hal ini faktor dari banyaknya Muslim yang berdiam di Australia datang dari berbagai macam negara di dunia, selain itu, imam di masjid memiliki peran tersendiri di Australia dalam caranya memahami Islam. (Munjin, 2009)

Dalam hubungan internal antara seorang Muslim dengan Muslim yang lain mengalami hubungan yang baik-baik saja sejauh ini, meskipun terkadang ada beberapa permasalahan internal yang wajar apabila terjadi, karena pada dasarnya mereka berlatar belakang dari negara yang berbed-beda, terlepas dari hal yang demikian itu sesama minoritas Muslim

saling menghargai perbedaan dan mereka sepakat dengan adanya perbedaan dan pemahaman penafsiran setiap individu.

Sedangkan dalam hubungan eksternal dengan kaum mayoritas, mereka bisa menempatkan diri sebagai minoritas. Mereka bisa membedakan mana isu-isu yang bisa diperdebatkan atau hanya disimpan di hati dan pikiran saja. Misalnya hal-hal yang mengundang sensitif terhadap kaum mayoritas seperti nilai-nilai barat, kesesuaian deklarasi Hak Asasi Manusia, dan lain sebagainya. Perihal selanjutnya adalah pemerintah Australia memberikan kebebasan bagi siapa saja warganya untuk menganut agama yang akan mereka pilih, itu sudah menjadi hak setiap individu, Muslim bebas untuk beribadah tanpa adanya intimidasi.

Sebagai kaum yang Minoritas di Australia, Muslim disana tidak pernah melakukan demonstrasi dan melakukan penyitaan terhadap kemaksiatan yang ada disana seperti bir, perjudian, prostitusi, kehidupan malam dan lain sebagainya. Meskipun disini lain mereka tidak setuju dengan adanya hal tersebut. Hal ini dikarenakan mereka sadar bahwa Australia adalah negara plural, baik agama, suku, tradisi, ras dan sistem kepercayaan yang berbeda-beda dalam menyikapi isu tersebut. Disamping itu, mereka mempunyai hak dan kebebasan untuk melakukan tindakan dan perbuatan sesuai dengan pandangan hidup mereka. Muslim di Australia mempunyai pandangan bahwa mereka tidak memiliki tugas untuk mengubah Masyarakat Australia. (Munjin, 2009)

Mantan Presiden Iran, Mohammad Khatami, dalam sidang UN pada tahun 1999 menyampaikan gagasannya tentang Dialogue Among Civilization (percakapan antar peradaban), sebagai bentuk tidak setuju atas pandangan clash of Civilization (benturan peradaban) yang dipopulerkan Samuel Huntington. Khatami mengajak seluruh negara dan umat manusia berjuang demi terciptanya dialog antar peradaban. Bahwa islam dan Barat dapat duduk bersama dan mulai membicarakan kemungkinan akan adanya peradaban ini guna bekerja sama untuk perdamaian.

Dalam upaya menciptakan dialog antar peradaban tersebut, masyarakat Muslim Barat adalah “jembatan”

mengingat masyarakat Muslim Barat yang sesungguhnya paling mengerti tentang kehidupan di Dunia Barat. Disisi lain mereka merupakan bagian dari Barat itu sendiri. Begitupun di Australia, Muslim Australia merupakan kelompok yang mengerti kehidupan Australia. Hal ini tentu menjadikan harapan Muslim Australia untuk menunjukkan tentang Islam yang ramah dan bersahabat, islam yang anti perang dan Islam anti terorisme. (Galib, 2017)

Salah satu strategi yang mungkin dilakukan seorang Muslim yang mendiami suatu wilayah yang penduduknya mayoritas non-Muslim adalah dengan membangun kepercayaan terhadap mayoritas, bahwa Islam adalah agama yang damai dan anti kekerasan. Hal ini merupakan sebuah tantangan tersendiri sebagai Muslim yang menjadi minoritas di sebuah negara, sebab tindakan-tindakan yang dilakukan oleh militan fundamentalis Islam memunculkan pandangan tersendiri di masyarakat Internasional bahwa Islam adalah agama kekerasan dan identik dengan terorisme. Oleh karena itu, di Inggris muncul istilah baru yaitu Islamophobia yaitu “unfounded hostility towards Islam” (permusuhan yang tidak berdasar terhadap Islam) dan tindakan diskriminatif baik terhadap individu maupun komunitas Muslim dan berusaha untuk mengeluarkannya dari mainstream sosial politik. (Munjin, 2009)

B. Hubungan Antara Muslim dan Non-Muslim Australia

Secara umum sudah diketahui bahwa sebagian masyarakat Australia merupakan imigran yang datang dari berbagai belahan negara di dunia, bahkan sedikit sekali presentase jumlah penduduk asli suku Australia yaitu suku Aborigin. Tujuan para imigran ke Australia adalah untuk bekerja, bermukim, belajar, menjauhkan diri dari kemiskinan, melepaskan diri dari peperangan dan lain sebagainya. Oleh karena itu perbedaan ras, suku, budaaya, dan kegamaan sudah merupakan hal yang mendarah daging bagi sebagian besar masyarakat Australia. Meskipun dengan keanekaragaman yang

ada masyarakat tetap mengharaplan dapat hidup damai antara individu dengan individu lainnya.

Australia menganut sistem kebijakan multikulturalisme. Dapat diartikan bahwa terdapat kebijakan toleransi atas perbedaan kebudayaan dan bangsa yang dalam hal ini melindungi warganya dari terjadinya diskriminasi. Kebijakan multikulturalisme ini bertujuan untuk menjaga kerukunan antar sesama dan tetap mempertahankan kebudayaan atau agama masing-masing. (Poetrie, 2013)

Hubungan Muslim dan non-Muslim di Australia seringkali mengalami pasang surut dimana terkadang antara muslim dan non-Muslim saling menghargai perbedaan yang ada, namun disisi lain ada juga hal-hal yang menimbulkan permasalahan antara kedua belah pihak. Hal ini diakibatkan oleh banyak faktor, yaitu sejarah, generalisasi yang berlebihan atas pemahaman komunitas Muslim, maupun terkait perkembangan situasi yang kompleks dengan adanya isu-isu nasional maupun internasional (Kartini, Minoritas Islam di Australia dan Inggris)

Kondisi Muslim di Australia pasca Bom London yang terjadi pada 7 Juli 2005 tidak lagi sama seperti sebelum adanya peristiwa tersebut. Pemerintah Negara Barat terus menerus melakukan kampanye dan memberlakukan undang-undang bagi setiap Muslim yang tinggal di Negara Barat. Mereka mencoba membuat opini publik bahwa undang-undang tersebut guna melindungi budaya dan memerangi bahaya terorisme di negara mereka. Hal-hal tersebut justru memperburuk dan melemaahkan keadaan Muslim di Negara Barat. (Kurniawan, Sejarah Masuknya Islam Ke Australia, 2014)

Sebelum adanya peristiwa 11 september, Bom Bali, dan Bom London hubungan Muslim dan non-Muslim di Australia berjalan cukup baik. Berbeda halnya ketika masyarakat sudah disuguhkan dengan berbagai opini publik dan pengaruh media massa. Saat ini media massa memiliki pengaruh yang sangat besar, karena setiap warga bisa mengaksesnya dengan sangat mudah. Banyak warga Muslim yang mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan dari masyarakat non-Muslim maupun dari pemerintah akibat dari permasalahan ini. Sementara itu, media

Islam di Australia tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk menutupi maraknya pemberitaan negatif tentang Islam karena faktor media massa Islam yang memiliki jumlah sedikit. (Wulandhari, 2016). Namun demikian hubungan individu antar Muslim dan non-Muslim masih cukup baik, meskipun terkadang sebutan teroris sering dilontarkan oleh non-Muslim terhadap Muslim.

Sebagai kaum minoritas di negara Australia, umat Muslim di Australia memiliki harapan dapat lebih mudah menjalankan aktifitas ibadahnya. Adapun harapan yang dimiliki seorang Muslim terhadap media massa dan pemerintah adalah tidak terus menerus menyudutkan mereka dengan hal-hal yang tidak sebenarnya terjadi kepada mereka, seperti terorisme, ekstrimis, Islam radikal dan lain sebagainya. (Kurniawan, Sejarah Masuknya Islam Ke Australia, 2014)

Media massa saat ini memegang peran penting dalam pembentukan opini publik hal ini juga terjadi dengan eksistensi kelompok Muslim. Meskipun dalam perkembangannya kelompok Muslim ini mengorganisasi diri dalam bentuk organisasi, dari organisasi formal yang bergerak dibidang sosial kemasyarakatan sampai organisasi radikal, diskursus yang berkembang dalam masyarakat Australia khususnya yang berkaitan dengan fundamentalisme atau terorisme tidak harus selalu dihubungkan dengan organisasi umat Islam ini. Hal ini sering menimbulkan salah persepsi mengenai eksistensi komunitas Muslim di Australia dan keterkaitannya dengan isu-isu terorisme. (Kartini, MINORITAS MUSLIM DI AUSTRALIA DAN INGGRIS, 2016)

Media Massa Australia menganut sistem kebebasan pers liberal. Tidak ada legislasi yang memberikan kewenangan bagi pemerintah federal untuk campur tangan, baik dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, terhadap isi pemberitaan maupun program-program dalam media massa. Rumusan pers liberal yaitu sistem pers yang tidak mengenal lembaga sensor, yang artinya bahwa siapapun, kalau mampu secara ekonomi, boleh menerbitkan surat kabar dan pemerintah tidak berhak mengatasinya. Walaupun pemerintah memiliki kewenangan untuk mengintervensi media massa, maka hal itu dilakukan

secara selektif dan tidak menyangkut masalah pemberitaan. (Hamid, Sistem Politik Australia, 1999)

Prof. Des Cahill, Professor of Intercultural Studies, School of Global, Urban and Social Studies RMIT University Melbourne mengatakan bahwa Islam di Australia juga mengalami masa sulit pasca terjadinya bom Bali tahun 2002. “masa masa sulit dialami oleh warga Muslim di Australia pasca terjadinya peledakan Bom Bali, Inilah yang menjadi tantangan agar mengembalikan citra baik Islam di hadapan kaum mayoritas”. Bom Bali menjadi topik besar bagi masyarakat Australia. Pada saat itu warga Australia menganggap bahwa Islam adalah agama yang keras dan selalu berhubungan dengan terorisme. (UMY B. , 2013)

Selama ini, pemerintah Australia dan masyarakat Australia menghormati pelaksanaan atas multikultur Australia. Namun ada beberapa isu yang menjadikan hubungan Muslim dengan non-Muslim memburuk salah satunya ketika adanya isu internasional yang merupakan generalisasi berlebihan atas suatu persoalan, atau stigma atas sebuah kelompok Muslim Australia yang kemungkinan dipengaruhi oleh opini-opini yang dibangun oleh sebagian besar media masa. Karena tidak bisa dipungkiri bahwa pada zaman sekarang media massa sangat berperan penting dalam menyalurkan informasi baik masalah domestik maupun internasional. (Kartini, MINORITAS MUSLIM DI AUSTRALIA DAN INGGRIS, 2016)

Masyarakat Australia berpandangan bahwa adanya kedekatan Islam dengan terorisme Arab, dan hal-hal yang menyudutkan umat Islam di Australia, pada beberapa peristiwa telah memunculkan adanya tindakan diskriminatif bahkan kekerasan, seperti ketika dilakukan perluasan pada komunitas Muslim Australia pasca peledakan Bom WTC dan Bom Bali. (Kartini, MINORITAS MUSLIM DI AUSTRALIA DAN INGGRIS, 2016)

Pembangunan masjid di Australia merupakan salah satu kendala yang sering dihadapi oleh Muslim di Australia. Masyarakat merasa keberatan akan adanya pembangunan mesjid. Pada dasarnya hal itu didasari kurangnya pengetahuan mereka tentang Islam dan bagaimana cara seorang Muslim

beribadah. Salah satu contoh adalah pembangunan proyek Masjid Algester. Abdul Rahman Deen seorang Ketua Program Pembangunan Masjid Algester Brisbane menyatakan ketika proposal pembangunan Masjid Algester disampaikan kepada Balai Kota, ada dua pernyataan penolakan dari warga. Masyarakat biasanya mengkhawatirkan soal parkir. Selain itu ada juga masyarakat yang menduga bahwa masjid akan menimbulkan kebisingan karena setiap adzan dikumandangkan akan menghasilkan suara layaknya gereja membunyikan bel. Mereka takut apabila nanti masjid membunyikan bel atau mengumandangkan adzan 5 kali dalam satu hari. (Dakwatuna.com, 2010)

Tantangan lainnya adalah persatuan umat Islam. Muslim di Australia cenderung terpecah dan mengelompokkan diri berdasarkan etnis mereka masing-masing. Muslim Albania, Muslim Turki, Muslim India, atau Muslim Pakistan. Kondisi politik di negeri Muslim ikut mempengaruhi hubungan umat Islam di Australia. Komunitas Turki misalnya, mereka terpecah menjadi Muslim yang membela Recep Tayyip Erdogan dan Muslim yang membela Fethullah Gulen. (Galib, 2017)

Kecenderungan politik justru memiliki peran yang sangat vital dan menjadikan komunitas Muslim Turki terpecah menjadi Muslim yang membela Recep Tayyip Erdogan dan Muslim yang membela Fethullah Gulen. Pembicaraan tentang politik Turki di komunitas ini menjadi isu yang sangat sensitif. Bagi mereka yang mendukung Erdogan, mereka merasa bahwa pemerintahan Turki telah memberikan banyak dukungan terhadap umat Islam, termasuk Muslim di Australia. Sebaliknya, mereka yang mendukung Gulen mengungkapkan bagaimana Erdogan bertransformasi menjadi diktator baru yang dengan mudahnya yang akan menyalahkan Gulen atas setiap kasus yang terjadi di Turki, bahkan tentang kasus-kasus yang tidak ada hubungannya dengan Gulen sekalipun. Hal ini tentu saja menyisakan pedih karena permasalahan politik yang berada di Turki justru mempengaruhi hubungan sesama Muslim di Australia. (Forum Alumni MEP Australia-Indonesia, 2007)

Nadirsyah Hosen seorang pengurus besar Nahdlatul Ulama (NU) di Australia mengungkapkan bahwa tantangan

yang dihadapi Muslim Australia terkadang datang dari Muslim itu tersendiri terutama masalah ego. Menurut Hosen, banyak kelompok Muslim dari berbagai negara berkeinginan membangun masjid untuk kalangan mereka sendiri. Bahkan seringkali, kelompok Muslim yang kebanyakan imigran ini justru mendatangkan dai dari negara asal (Natashi, 2016). Faten Mohamed seorang peserta pertukaran pelajar Muslim juga mengakui bahwa umat Muslim Australia masih belum bersatu dalam hal keyakinan. Seringkali, Muslim Australia berkubukubuk oleh kebiasaan cara beribadah yang mereka bawa dari latar belakang negara masing-masing (Wulandhari, 2016)

Semenjak maraknya pemberitaan Internasional mengenai Bom Bali hal ini berdampak juga bagi pendidikan Muslim di Australia dimana target juga di arahkan ke sekolah-sekolah Muslim. Pemerintah melakukan peninjauan ulang terkait kurikulum yang diajarkan sekolah-sekolah tersebut. Rencana ini banyak mendapatkan reaksi dari Muslim yang berada di Australia karena kurikulum yang diajarkan di sekolah-sekolah Muslim sama dengan kurikulum yang diajarkan oleh sekolah umum lainnya. Terlebih tidak sedikit murid dari sekolah-sekolah Muslim yang mendapatkan prestasi. Pemerintah Australia juga mengusulkan agar diadakannya pembelajaran mengenai nilai-nilai kemasyarakatan Australia, toleransi, tanggung jawab dan lain sebagainya, padahal pada dasarnya jauh sebelum pemerintah mengusulkan hal tersebut sekolah Muslim telah mengajarkan hal yang serupa demikian. Terlebih sekolah-sekolah Muslim tidak pernah memberi pelajaran tentang tindakan terorisme.

Tidak hanya sampai disitu, Bronwyn Bishop seorang anggota parlemen dari partai liberal mengusulkan larangan pemakaian jilbab pada kegiatan sekolah. Menurutnya, jilbab dianggap sebagai hal yang bertentangan dengan persamaan hak, nilai-nilai kemasyarakatan Australia, dan menyebabkan perpecahan. Usulan ini tentu banyak dapat kecaman dari penduduk Australia bahkan dari non-Muslim, mereka menganggap bahwa sama sekali tidak ada hubungannya antara menggunakan jilbab dengan persamaan hak, nilai-nilai kemasyarakatan Australia, apalagi sampai menimbulkan

perpecahan. (Kurniawan, Sejarah Masuknya Islam Ke Australia, 2014)

Dunia Islam saat ini sering kali diberitakan tentang kekerasan, komunitas Muslim hampir diseluruh bagian dunia tercemari dengan kekerasan didalamnya dari dunia paling timur di Afrika, Asia, dan bahkan di Eropa. Banyak kasus mengenai konflik di Dunia Islam yang sangat sulit untuk di analisa karena setiap konflik kekerasan mempunya latar belakang permasalahan yang berbeda. Banyak sekali hal terkait kekerasan yang sering di asosiasikan dengan konflik fisik, perang, dan terorisme. Seperti terjadi di Sudan dan Nigeria dimana terjadi konflik antara Muslim dan kristen, di Pakistan terjadi konflik perebutan kekuasaan para elite politik yang tidak berakhir sampai saat ini, di Indonesia terjadi kasus yang menjadi perhatian dunia dengan serangkaian kasus Bom Bali I dan II. Untuk mengatakan Islam adalah kekerasan bukanlah suatu kesimpulan yang tepat untuk semua konflik kekerasan tersebut. Akan tetapi kedekatan umat islam dengan konflik baik dalam internal Muslim sendiri atau dengan pemeluk agama lain yang menyebabkan legitimasi asumsi global akan kedekatan Islam dengan kekerasan. (Kurniawan, Sejarah Masuknya Islam Ke Australia, 2014)

Dibalik tantangan-tantangan itu, kehadiran Muslim di Australia dapat dilihat sebagai upaya mengenalkan Islam kepada Barat. Begitupun sebaliknya, Barat tidak harus dilihat sebagai musuh. Melihat Barat sebagai Musuh justru hanya akan menempatkan Muslim pada kubu-kubu yang berujung pada pembenaran akan benturan peradaban. (Galib, 2017)

Terlepas mengenai konflik internasional, permasalahan lainnya ada mengenai kesulitan seorang Muslim untuk menemukan produk-produk yang halal untuk di gunakan. Sebagai seorang Muslim mengkonsumsi makanan halal merupakan sebuah kewajiban. Sebagai seorang Muslim mengkonsumsi makanan halal merupakan sebuah kewajiban. Di Australia Muslim merupakan agama yang minoritas sehingga sering kali seorang Muslim kesulitan dalam mendapatkan makanan halal. kesulitan ini bermula pada aspek sertifikat halal. Hal ini dikarenakan banyak rumah potong

hewan yang ingin mendapatkan daging halal hanya dengan memperkerjakan orang Islam tanpa pemahaman sesuai syariat Islam. (Natashi, 2016) selain itu banyak umat Muslim di Australia yang merasa kesulitan mendapatkan makanan halal karena sebagian pemerintah menganggap bahwa untuk melakukan sertifikasi halal membutuhkan dana yang besar, dan mereka menganggap bahwa dari dana tersebut bisa dijadikan umat Islam untuk kepentingan terorisme.